

## Daftar Pustaka

### Buku

- Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori & Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media
- Badjuri, Abdulkarah dan Teguh Yuwono. 2002. *Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Predana Media Group
- Dunn, W. N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua* (terjemahan/ Penyunting Muhadjid Darwin dkk.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Keban, Y. T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep Teori dan Isu*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- Nugroho, Riant D. 2006. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Subarsono. 2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suryabrata, Sumadi. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Suwitri, S. 2014. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Syafiie, I. K. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Wibawa, Samodra dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

## **Jurnal**

- Arku, G., Mensah, K. O., Allotey, N. K., & Addo Frempong, E. (2016). Non-compliance with building permit regulations in Accra-Tema city-region, Ghana: exploring the reasons from the perspective of multiple stakeholders. *Planning Theory & Practice*, 17(3), 361-384.
- Botchway, E. A., Afram, S. O., & Ankrah, J. (2014). Building permit acquisition in Ghana: The situation in Kumasi.
- Budiman, A. (2013). EVALUASI RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 1(2), 119-122.
- Cahyani, G. P., & Marom, A. (2017). Evaluasi Kebijakan Retribusi Tempat Rekreasi Di Kabupaten Kudus. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(2), 270-282.
- Eirinaki, M., Dhar, S., Mathur, S., Kaley, A., Patel, A., Joshi, A., & Shah, D. (2018). A building permit system for smart cities: A cloud-based framework. *Computers, Environment and Urban Systems*, 70, 175-188.
- Febriani, A. E. (2015). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KECAMATAN TENGGARONG AJI ELLIYANA FEBRIANI1.
- Hutabarat, H., & Santoso, R. S. (2019). Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 559-573.
- Jovanović, T., Aristovnik, A., & Lugarić, T. R. (2016). A comparative analysis of building permits procedures in Slovenia and Croatia: development of a simplification model. *Theoretical and Empirical Researches in Urban Management*, 11(2), 5-23.
- Mansur, M. Evaluasi Kebijakan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kabupaten Mamuju Utara. *Katalogis*, 4(4).
- Tatzuko, H. (2009). *Kajian Yuridis Perda No. 9 Tahun 2006 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pemalang* (Doctoral Dissertation, Universitas Negeri Semarang).
- Wulandari, Ari (2018). *Evaluasi Program Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di DPMPTSP Kota Magelang*. (Skripsi, Universitas Tidar Magelang)

Yulianti, W., & Hadi, S. P. (2018). The Effectiveness of Building Permit Regulation for Green Open Space at Housing Estates: Case Study of Kendal Regency, Central Java, Indonesia. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 31, p. 07003). EDP Sciences.

### **Dokumen**

Badan Pusat Statistik Kota Semarang. 2018. *Profil Kependudukan Kota Semarang Tahun 2018*. Semarang: BPS Kota Semarang

Badan Pusat Statistik Kota Semarang. 2019. *Statistik Daerah Kota Semarang 2019*. Semarang: BPS Kota Semarang

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2012

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2013

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2014

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

Laporan Kinerja Insansi Pemerintah (LkjIP) Pemerintah Kota Semarang Tahun 2018

### **Regulasi**

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bangunan Gedung

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

### **Internet**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. 2019. *Jumlah Penduduk Kota Semarang*. <http://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/statistik/jumlah-penduduk-kotasemarang/2018-12-02> (diakses pada 15 Januari 2019)

<http://distaru.semarangkota.go.id> (diakses pada 15 Desember 2019)

<http://dpmptsp.izin.semarangkota.go.id> (diakses pada 30 September 2018)

Setiawan, Lucky. (22 Februari 2018). Ketua IPPAT Kota Semarang : Ngurus izin KRK dan IMB sampai 5 Bulan. Diambil dari

[http://rri.co.id/semarang/post/berita/494336/daerah/ketua\\_ippat\\_kota\\_semarang\\_ngurus\\_izin\\_krk\\_dan\\_imb\\_sampai\\_5\\_bulan.html](http://rri.co.id/semarang/post/berita/494336/daerah/ketua_ippat_kota_semarang_ngurus_izin_krk_dan_imb_sampai_5_bulan.html). (2 November 2018)